



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KEPALA PERWAKILAN
DALAM ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAHUN 2015**

1. Poso
2. Sigi

PADA TANGGAL 22 JUNI 2016

**OLEH:
DRS. BAYU SABARTHA, MBA
KEPALA BPK PERWAKILAN SULAWESI TENGAH**

Yth. Ketua DPRD, Kab. Poso dan Kab. Sigi

Yth. Bupati Kab. Poso dan Kab. Sigi

Yth. Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Yth. Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Sulawesi Tengah serta hadirin yang kami muliakan,

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2) dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), dimana BPK dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi

Kemudian shalawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah S.A.W yang telah membuat kita menjadi lebih baik. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1437 H bagi yang melaksanakan.

Pimpinan DPRD, Para Bupati Bupati, serta hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Poso dan Kabupaten Sigi. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tersebut Tahun 2015, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan,

Perlu kami informasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Poso dan Kabupaten Sigi tahun 2015 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Dengan adanya perubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis *Cash Toward Accrual* menjadi Laporan Keuangan berbasis Akrual, jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari 4 laporan menjadi 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dan penerapan SAP berbasis Akruar.

Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan,

Pemeriksaan BPK yang dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan dengan memperhatikan kriteria pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan **Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi belum sepenuhnya** sesuai dengan SAP berbasis akruar, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap kepatuhan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern. Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi Anggaran 2015 adalah **“WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”**. Pemberian Opini WDP adalah berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

a. PEMERINTAH KABUPATEN POSO

Pemerintah Kabupaten Poso menyajikan nilai Kas di BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp4,41 miliar. Kelemahan pengendalian dalam penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Poso mengakibatkan terjadinya kekurangan kas pada Bendahara Penerimaan senilai Rp376,61 juta.

Dalam pemeriksaan LKPD TA 2014 diungkapkan bahwa BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas saldo aset tetap per 31 Desember 2014. Permasalahan yang diungkapkan antara lain bahwa Pemerintah Kabupaten Poso belum menuntaskan proses inventarisasi aset tetap secara menyeluruh. Sampai dengan posisi Neraca per 31 Desember 2015, selain sisa permasalahan yang belum ditindaklanjuti atas temuan tahun 2014, masih ditemukan permasalahan, yaitu aset ekstrakomptabel sebelum tahun 2014 minimal senilai Rp22,44 miliar masih tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2015, kapitalisasi pengembangan aset tetap pada aset induk tidak diikuti dengan penyesuaian masa manfaat, aset tetap minimal senilai Rp10,94 miliar tidak dikapitalisasi, aset tetap senilai Rp2,63 miliar tidak diketahui keberadaannya, dan aset tetap eks Dana Hibah BOS TA 2014 dan 2015 belum divalidasi dan dicatat.

Selain itu BPK mencatat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Kelemahan Pengendalian atas Pengelolaan Pendapatan dan Piutang PBB-P2.

- 2) Kelemahan Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat
- 3) Penggunaan Langsung atas Pendapatan Retribusi Daerah pada Dua SKPD
- 4) Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas
- 5) Kekurangan Volume Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal

b. PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

Pemerintah Kabupaten Sigi menyajikan Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp191,77 juta, diantaranya merupakan saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagai bagian paragraf kualifikasi Laporan Keuangan per 31 Desember 2014, namun tidak ditindaklanjuti proses tuntutan TP TGR-nya.

Dalam pemeriksaan LKPD TA 2014 diungkapkan bahwa BPK tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas saldo aset tetap per 31 Desember 2014, namun tidak ada perbaikan yang signifikan tahun 2015, yaitu tidak dilakukan sensus barang milik daerah dan tidak dilakukan rekonsiliasi atas aset tetap eks penyerahan Kabupaten Donggala. Hal ini berdampak pada kewajaran penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2015, dimana belum ada kapitalisasi atas pengeluaran sebesar Rp87,39 miliar, Aset tanah dibawah Jalan yang belum jelas luas dan nilainya, 133 unit kendaraan senilai Rp4,68 miliar tidak diketahui keberadaannya, peralatan mesin sebesar Rp15,31 miliar belum teridentifikasi dan diantaranya masih menyatu dengan aset gedung dan bangunan.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga menyajikan Saldo belanja modal tahun 2015 sebesar Rp202,29 miliar. Belanja tersebut diantaranya direalisasikan untuk kegiatan Pembangunan Jalan yang berindikasi volume yang menjadi dasar pembayarannya tidak benar karena adanya ketidakcukupan catatan akuntansi, pembatasan pemerolehan informasi yang cukup dan kelemahan proses perencanaan maupun pelaksanaannya yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu BPK mencatat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sigi tidak menyajikan pendapatan, beban, kas lainnya, dan persediaan yang dihasilkan dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS);
- 2) Pengendalian kualitas atas item Pekerjaan Lapis Lapen, Latasir Kelas A, dan Campuran Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC) pada paket pekerjaan jalan belum dilakukan secara optimal;
- 3) Kekurangan volume pekerjaan pada 32 paket Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan pada 5 paket pekerjaan belanja tidak terduga perbaikan darurat jalan dan sungai.

Hadirin yang Kami hormati,

Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Hadirin yang Kami muliakan,

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya BPK dalam mewujudkan visi dan misinya yakni mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Selain itu, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK.

Sekian dan terima kasih,

Wa Billahittaufiq Wal Hidayah,

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, Juni 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**